

**LAPORAN KEUANGAN
KPKNL MEDAN
TAHUN 2025 (AUDITED)**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Keuangan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan disertai dengan Lampiran Laporan Keuangan meliputi informasi keuangan tertentu dan informasi penting lainnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 Triwulan III TA 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dan sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Keuangan. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Medan, 05 Mei 2026
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Heri Supriyanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	4
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	5
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA.....	7
II. LAPORAN OPERASIONAL.....	9
III. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	11
IV. NERACA.....	13
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	14
A. Penjelasan Umum.....	14
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	34
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	41
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	49
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	55
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	56
VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2025 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan, 05 Mei 2026

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Heri Supriyanto

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan KPKNL Medan Tahun 2025 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja periode sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 38.636.100.286 atau mencapai 176,15% dari Estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp21.933.199.000.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.750.601.682,00 atau mencapai 81,86% dari alokasi anggaran sebesar Rp3.360.096.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 10.602.992.313,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 1.923.658.190,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp 8.676.470.123,00 Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 2.864.000,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 1.841.338.513 dan Rp 8.761.653.800.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 38.539.802.874,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 3.032.165.449,00 sehingga terdapat surplus dari kegiatan Operasional senilai Rp 35.507.637,425,00 Surplus/Defisit dari Kegiatan NonOperasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.123.000,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp 35.508.760.425,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp 9.090.483.097,00 ditambah surplus-LO sebesar Rp35.508.760.425,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan dikurangi transaksi antar entitas sebesar (Rp 35.837.589.722,00) sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp8.761.653.800,00.

5. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2025 (Audited) dilampiri dengan informasi keuangan tertentu dan informasi penting lainnya serta data capaian output per fungsi dan Program Prioritas Nasional Tahun 2025. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025
DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025 (Audited)			Tahun 2024 (Audited)
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
1. PENERIMAAN DALAM NEGERI				
a. Penerimaan Perpajakan				
i. Pendapatan Pajak Dalam Negeri				
ii. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional				
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak				
i. Pendapatan Badan Layanan Umum				
ii. Pendapatan PNB Lain-lain	21.933.199.000	38.636.100.286	176,15	27.521.245.498
2. HIBAH				
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	21.933.199.000	38.636.100.286	176,15	27.521.245.498
B. BELANJA				
Belanja Operasi				
1. Belanja Pegawai				
2. Belanja Barang	3.095.073.000	2.611.312.382	84,37	2.959.548.812
3. Belanja Modal	265.023.000	139.289.300	52,56	2.463.600.701
JUMLAH BELANJA	3.360.096.000	2.750.601.682	81,86	5.423.149.513

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN 537831

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:24 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	21,933,199,000	38,636,100,286	16,702,901,286	176	19,563,030,000	27,521,245,498	(7,958,215,498)	141
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	21,933,199,000	38,636,100,286	16,702,901,286	176	19,563,030,000	27,521,245,498	(7,958,215,498)	141
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	21,933,199,000	38,636,100,286	16,702,901,286	176	19,563,030,000	27,521,245,498	(7,958,215,498)	141
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,360,096,000	2,750,601,682	(609,494,318)	82	5,927,193,000	5,423,149,513	504,043,487	91
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	3,095,073,000	2,611,312,382	(483,760,618)	84	3,388,022,000	2,959,548,812	428,473,188	87
3. Belanja Modal	265,023,000	139,289,300	(125,733,700)	53	2,539,171,000	2,463,600,701	75,570,299	97
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN 537831

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:24 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,360,096,000	2,750,601,682	(609,494,318)	82	5,927,193,000	5,423,149,513	504,043,487	91
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Medan, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Heri Supriyanto
198112152002121002

II. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

KEMENTERIAN KEUANGAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN		
Pendapatan Perpajakan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	38,539,802,874	27,610,076,740
JUMLAH PENDAPATAN	38,539,802,874	27,610,076,740
BEBAN		
Beban Pegawai	0	0
Beban Persediaan	178,648,330	197,093,160
Beban Barang dan Jasa	1,449,972,001	1,377,444,769
Beban Pemeliharaan	312,563,125	447,455,968
Beban Perjalanan Dinas	641,145,546	955,649,944
Beban Penyusutan dan Amortisasi	449,836,447	472,106,080
JUMLAH BEBAN	3,032,165,449	3,449,749,921
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	35,507,637,425	24,160,326,819
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	1,123,000	
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,123,000	1,578,000
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,123,000	1,578,000
POS LUAR BIASA		
Beban Luar Biasa	0	
SURPLUS /(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	35,508,760,425	24,161,904,819
SURPLUS/(DEFISIT) LO	35,508,760,425	24,161,904,819

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (537831) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MEDAN

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:22 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	38,539,802,874	27,610,076,740	10,929,726,134	39.586
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	38,539,802,874	27,610,076,740	10,929,726,134	39.586
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	38,539,802,874	27,610,076,740	10,929,726,134	39.586
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	178,648,330	197,093,160	(18,444,830)	(9.358)
Beban Barang dan Jasa	1,449,972,001	1,377,444,769	72,527,232	5.265
Beban Pemeliharaan	312,563,125	447,455,968	(134,892,843)	(30.147)
Beban Perjalanan Dinas	641,145,546	955,649,944	(314,504,398)	(32.91)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (537831) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MEDAN

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:22 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	449,836,447	472,106,080	(22,269,633)	(4.717)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,032,165,449	3,449,749,921	(417,584,472)	(12.105)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	35,507,637,425	24,160,326,819	11,347,310,606	46.967
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	1,123,000	0	1,123,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	1,123,000	0	1,123,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,578,000	(1,578,000)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	19,128,000	(19,128,000)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	17,550,000	(17,550,000)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,123,000	1,578,000	(455,000)	(28.834)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	35,508,760,425	24,161,904,819	11,346,855,606	46.962
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	35,508,760,425	24,161,904,819	11,346,855,606	46.962

Keterangan :
FINAL

Medan, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Heri Supriyanto
198112152002121002

III. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

**KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
DAN 31 DESEMBER 2024**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Ekuitas Awal	9.090.483.097	7.567.454.216
Surplus/Defisit -LO	35.508.760.425	24.161.904.819
Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas	0	0
Penyesuaian Aset	0	0
Selisih Penyesuaian Aset	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	0	0
Transaksi Antar Entitas	-35.837.589.722	-22.638.875.938
Kenaikan/Penurunan Entitas	-328.829.297	1.523.028.881
Ekuitas Akhir	8.761.653.800	9.090.483.097

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (537831) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MEDAN

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:24 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	9,090,483,097	7,567,454,216	1,523,028,881	20.13
SURPLUS/DEFISIT-LO	35,508,760,425	24,161,904,819	11,346,855,606	46.96
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(35,837,589,722)	(22,638,875,938)	(13,198,713,784)	58.3
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(328,829,297)	1,523,028,881	(1,851,858,178)	(121.59)
EKUITAS AKHIR	8,761,653,800	9,090,483,097	(328,829,297)	(3.62)

Keterangan :

FINAL

Medan, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Heri Supriyanto

198112152002121002

IV. NERACA

KEMENTERIAN KEUANGAN NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	909.090	10.220.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	1.841.338.513	11.047.669.772
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	7.671.740	93.535.242
Persediaan	73.738.847	44.755.467
JUMLAH ASET LANCAR	1.923.658.190	11.196.180.481
ASET TETAP		
Tanah	3.798.662.202	3.798.662.202
Peralatan dan Mesin	4.303.554.618	5.203.396.059
Gedung dan Bangunan	4.138.425.855	4.138.425.855
Aset Tetap Lainnya	4.332.000	7.196.000
Akumulasi Penyusutan	-3.568.504.552	-4.204.974.546
JUMLAH ASET TETAP	8.676.470.123	8.942.705.570
ASET LAINNYA		
Aset Lain-Lain	853.720.441	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	-850.856.441	0
JUMLAH ASET LAINNYA	2.864.000	0
JUMLAH ASET	10.602.992.313	20.138.886.051
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang kepada pihak ketiga	1.841.338.513	11.042.015.454
Utang Jangka Pendek lainnya	0	6.387.500
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.841.338.513	11.048.402.954
JUMLAH KEWAJIBAN	1.841.338.513	11.048.402.954
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	8.761.653.800	9.090.483.097
JUMLAH EKUITAS	8.761.653.800	9.090.483.097
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	10.602.992.313	20.138.886.051

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (537831) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MEDAN

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:25 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	909,090	10,220,000	(9,310,910)	(91.10)
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,841,338,513	11,047,669,772	(9,206,331,259)	(83.33)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	7,671,740	93,535,242	(85,863,502)	(91.80)
Persediaan	73,738,847	44,755,467	28,983,380	64.76
JUMLAH ASET LANCAR	1,923,658,190	11,196,180,481	(9,272,522,291)	(82.82)
ASET TETAP				
Tanah	3,798,662,202	3,798,662,202	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,303,554,618	5,203,396,059	(899,841,441)	(17.29)
Gedung dan Bangunan	4,138,425,855	4,138,425,855	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	4,332,000	7,196,000	(2,864,000)	(39.80)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,568,504,552)	(4,204,974,546)	636,469,994	(15.14)
JUMLAH ASET TETAP	8,676,470,123	8,942,705,570	(266,235,447)	(2.98)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	853,720,441	0	853,720,441	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(850,856,441)	0	(850,856,441)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	2,864,000	0	2,864,000	
JUMLAH ASET	10,602,992,313	20,138,886,051	(9,535,893,738)	(47.35)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,841,338,513	11,042,015,454	(9,200,676,941)	(83.32)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	6,387,500	(6,387,500)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,841,338,513	11,048,402,954	(9,207,064,441)	(83.33)
JUMLAH KEWAJIBAN	1,841,338,513	11,048,402,954	(9,207,064,441)	(83.33)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	8,761,653,800	9,090,483,097	(328,829,297)	(3.62)
JUMLAH EKUITAS	8,761,653,800	9,090,483,097	(328,829,297)	(3.62)
JUMLAH EKUITAS	8,761,653,800	9,090,483,097	(328,829,297)	(3.62)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	10,602,992,313	20,138,886,051	(9,535,893,738)	(47.35)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

**SATUAN KERJA : (537831) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MEDAN**

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:25 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Medan, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Heri Supriyanto

198112152002121002 198112152002121002

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
9. Peraturan menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2018 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2012 tentang tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang dan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Informasi Akrua Pada Laporan Keuangan.
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

KPKNL Medan dibentuk dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. KPKNL Medan diharapkan dapat memfasilitasi tercapainya tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang Negara, dan lelang.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Medan berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan dan kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan visi KPKNL Medan, yaitu ***“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”***. Pengertian **profesional** dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. **Akuntabel** adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. **Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat** adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 6 (enam) misi yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. **Tujuan** yang hendak dicapai oleh KPKNL Medan untuk periode 2019-2024 adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Medan telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2019-2024, terdapat 7 (tujuh) **sasaran** yang terkait dengan KPKNL Medan yaitu :

1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal.

Mengkoordinasikan pemberian data dan informasi keberadaan *asset idle* K/L dalam rangka perencanaan pengadaan belanja modal dari K/L.

2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang andal dan akuntabel.

Penatausahaan kekayaan negara yang andal dan akuntabel adalah tercatatnya seluruh kekayaan negara/BMN dalam daftar barang baik di K/L sebagai pengguna dan di Kementerian Keuangan c.q. DJKN sebagai pengelola.

3. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip *the highest and best use*.

Pemanfaatan BMN adalah upaya penggunaan secara maksimal seluruh BMN untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggara negara.

4. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara.

Pelayanan pengelolaan kekayaan negara meliputi pelayanan permohonan penetapan status, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara.

5. Terwujudnya *database* nilai kekayaan negara yang kredibel.

Mendapatkan, mengumpulkan, dan mengolah data kekayaan negara sehingga menjadi informasi eksekutif yang utuh, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan.

6. Tingkat pendapatan yang optimal.

Tingkat pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan dalam negeri yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P.

7. Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi dan citra yang meningkat dengan didukung oleh tingkat pelayanan yang andal .

Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan *stakeholder* oleh lembaga independen atau internal DJKN. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra DJKN di mata *stakeholder*.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan **strategi** yang harus ditempuh oleh KPKNL Medan. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Medan yang akan ditempuh adalah :

1. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
2. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel.
3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum.
4. Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dengan penganggaran.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
6. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara.
7. Meningkatkan penerimaan kembali (*recovery*) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
8. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan *stakeholder* dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
10. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Pengelolaan Anggaran.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Medan melaksanakan **program** : Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh KPKNL Medan untuk mendapatkan suatu hasil.

Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Medan Tahun 2025

No	IKU	Target 2025	Realisasi 2025	Indeks
----	-----	-------------	----------------	--------

Laporan Keuangan KPKNL Medan Tahun 2025 (Audited)

1	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	120%	120
2	Indeks Integritas	100	105,29	120
3	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	126,06%	120
4	Tingkat optimalisasi pengelolaan asset negara	100%	86,88%	86,88%
5	Persentase realisasi pokok lelang	100%	105,65%	105,65
6	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	133,13%	120
7	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	95,72	120
8	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100%	117,36%	120
9	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120%	120
10	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	138,72%	120
11	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	105,15%	120
12	Persentase produktivitas lelang	80%	97,78%	120
13	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	120	120
14	Indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120

15	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	96,80%	120
16	Indeks Penanganan permasalahan hukum	100	114,66	114,66
17	Indeks pengelolaan layanan informasi public (PPID)	80	118,08	120
18	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	98,36	120
19	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	95,30%	110,65%	116,11
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				115,93%

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2025 (Audited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Medan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari beberapa Modul, yaitu Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Piutang, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul General Ledger Pelaporan (GLP). SAKTI Modul GLP diantaranya dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Jumlah entitas akuntansi satuan kerja KPKNL Medan adalah 1 entitas.

A.4 Basis Akuntansi

KPKNL Medan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Medan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 (Audited) ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Medan adalah sebagai berikut:

- **Pendapatan – LRA**

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

- **Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- Penerimaan Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual (setoran SSBP menggunakan MAP 425782). Pendapatan diakui pada saat diterimanya surat pemberitahuan pembatalan dari penjual oleh Kepala KPKNL dan disetor ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL;
- Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli Wanprestasi (setoran SSBP menggunakan MAP 425782. Pendapatan diakui pada saat telah ditetapkan Pembeli Lelang wanprestasi oleh Pejabat Lelang;
- Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang (setoran SSBP menggunakan MAP 425785). Pendapatan diakui pada saat telah pastinya pembayaran angsuran atau penarikan yang diindikasikan oleh telah diterimanya pembayaran oleh Bendahara Penerima atau telah masuk ke dalam rekening Bendahara Penerima dan telah terverifikasi.
- Penyetoran atas Penerimaan Piutang Negara Yang Tidak Jelas (setoran SSBP menggunakan MAP 425999). Pendapatan diakui

setelah Proses verifikasi dan konfirmasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak penerimaan tersebut masuk ke Rekening Penampungan Piutang dan telah disetorkan ke Kas Negara..;

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

- **Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- **Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- **Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

- **Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perhendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

a. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang jdih.kemenkeu.go.id - 240 - (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

b. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 266/KMK.06/2023 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji dalam tabel berikut.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan

direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 240/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten 10 tahun Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga 20 tahun Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni 25 tahun Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. 50 tahun II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat

dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

B. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. Implementasi Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI)

Mulai tahun 2018 KPKNL Medan telah mulai melaksanakan implementasi SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi) yang mengintegrasikan seluruh aplikasi yang berkaitan dengan laporan keuangan yaitu RKAKL-DIPA, SAS/SPM, Persediaan, SIMAK BMN & SAIBA, yang terdiri dari beberapa modul yaitu modul penganggaran, komitmen, PPSPM, bendahara pengeluaran/penerimaan, piutang, aset tetap, persediaan dan General Ledger Pelaporan (GLP). Untuk KPKNL

Medan ini pelaksanaan implementasi SAKTI nya termasuk ke dalam Tahap IIIB yang mana sebelumnya sudah dilakukan implementasi SAKTI pada internal Ditjen Perbendaharaan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2017 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis full akrual.

D. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi COVID-19, dijelaskan mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam penanganan pandemic COVID-19 sebagai berikut :

Akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 menjadi bagian dari laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan;

- Laporan keuangan sebagaimana dimaksud disusun menggunakan system aplikasi pelaporan dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
- Pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat;
- Entitas akuntansi dan atau entitas pelaporan melakukan pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari peristiwa luar biasa;
- Dalam hal diperlukan, entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan dapat menyusun laporan manajerial transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 sebagai laporan pendukung dan dapat menjadi bagian dari laporan keuangan.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 status pandemi COVID-19 dinyatakan telah berakhir dan status pandemi COVID-19 berubah menjadi penyakit endemi di Indonesia yang mulai berlaku

tanggal 21 Juni 2023, sehingga dengan terbitnya Keputusan Presiden tersebut, maka akun khusus COVID-19 hanya dapat digunakan sampai dengan berakhirnya status pandemic COVID-19 atau Semester I 2023.

A.6. PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Kementerian Keuangan RI terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik.

Pelaksanaannya di antaranya melalui Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang disertipikatkan. Adapun pagu anggaran TA 2025 untuk kegiatan tersebut adalah Rp17.514.000,00 dan realisasi sebesar Rp 11.700.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nama Satker	Program Prioritas	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Satuan RO	Target	Capaian RO	%
KPKNL MEDAN	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang disertipikatkan	17.514.000	11.700.900	Rekomendasi	516	516	100%
	Jumlah	17.514.000	11.700.900	Rekomendasi	516	516	100%

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan kerja KPKNL Medan memperoleh alokasi anggaran Tahun 2025 (Audited) sebesar Rp 3.360.096.000,00.

B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp38.636.100.286,00 atau mencapai 176,14% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp21.933.199.000.

Rincian estimasi dan realisasi PNBPN sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	55.447.000	171.226.280	308,81
2	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	5.251.501.000	5.186.421.210	98,76
3	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas 1	16.626.251.000	33.272.698.393	200,12
4	Pendapatan dari Pemindahan BMN L	-	1.123.000	0,00
5	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Seusai dengan Tusi	-	152.000	0,00
6.	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	-	3.979.403	0,00
7	Pendapatan Jasa Lainnya	-	500.000	0,00
	Jumlah	21.933.199.000	38.636.100.286	176,15
	Pengembalian Pendapatan	-	-	0,00
	Jumlah Netto	21.933.199.000	38.636.100.286	176,15

Realisasi PNBPN Tahun 2025 (Audited) mengalami kenaikan sebesar Rp 11.114.854.788,00 atau 28,77% dari realisasi 31 Desember 2024. Perbandingan realisasi PNBPN Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Laporan Keuangan KPKNL Medan Tahun 2025 (Audited)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	171.226.280	79.469.651	91.756.629,00	53,59
2	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	5.186.421.210	5.523.531.578	-337.110.368,00	-6,50
3	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	33.272.698.393	21.916.980.269	11.355.718.124,00	34,13
4	Pendapatan jasa Lainnya	500.000	-	500.000,00	100,00
5	Pendapatan sewa tanah, gedung dan Bangunan		1.264.000	-1.264.000,00	#DIV/0!
6	Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.123.000	-	1.123.000,00	100,00
7	Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	0,00	#DIV/0!
8	Pendapatan Anggaran Lain-lain	3.979.403	-	3.979.403,00	100,00
9	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarna sesuai dengan Tusi	152.000	-	152.000,00	100,00
	Pengembalian Pendapatan	-	-	0,00	#DIV/0!
					#DIV/0!
	Jumlah	38.636.100.286,00	27.521.245.498,00	11.114.854.788,00	28,77

B.2. Belanja

Realisasi belanja *KPKNL Medan* pada Tahun 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp2.750.601.682,00 atau sebesar 81,86 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp0,00. Anggaran belanja *KPKNL Medan* Tahun 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp 3.360.096.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 (*Audited*) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Barang	3.095.073.000	2.611.312.382	84,37
53	Belanja Modal	265.023.000	139.289.300	52,56
	Total Belanja Kotor	3.360.096.000	2.750.601.682	81,86
	Pengembalian	0	0,00	0.00
	Total Belanja Netto	3.360.096.000	2.750.601.682	81,86

Laporan Keuangan KPKNL Medan Tahun 2025 (Audited)

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 2.750.601.682,00.

Realisasi belanja KPKNL Medan per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 (Audited) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	% Real thd Angg
Rupiah Murni (01)				
4796	Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi	11.600.000	136.500	1,18
4798	Pengelolaan Aset	725.958.000	599.470.593	88,44
4700	Legislasi dan Litigasi	126.210.000	104.106.371	82,49
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2.146.713.000	1.925.785.602	89,71
4702	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	63.260.000	21.664.000	34,25
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	68.448.000	28.594.616	41,78
PNBP (04)				
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	2.327.000	-	0,00
4798	Pengelolaan Aset	89.848.000	70.844.000	78,85
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	125.732.000	-	0,00
Jumlah		3.360.096.000	2.750.601.682	81,86

Perbandingan realisasi belanja Tahun 2025 (Audited) dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/(Turun)	
		31 Desember 2025	31 Desember 2024	Rp	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0
52	Belanja Barang	2.611.312.382	2.959.548.812	(348.236.430,00)	(11,7%)
53	Belanja Modal	139.289.300	2.463.600.701	(513.271.929,00)	(20,8%)
	Jumlah	5.423.149.513,00	5.549.230.128,00	(513.271.929,00)	(9,3%)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negari Sipil (PNS) dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dikerjakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tidak ada realisasi karena mulai 1 Agustus 2020 pembayaran gaji pegawai sudah dipindahkan terpusat di Kantor Pusat DJKN dan terhitung mulai 1 Juli 2022 pembayaran gaji dipusatkan pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga pada satker KPKNL Medan tidak ada pagu maupun realisasi pembayaran untuk periode laporan ini.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.611.312.382 dan Rp2.959.548.812. Realisasi belanja barang Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (11,77) persen dari realisasi belanja barang 31 Desember 2024.

Rincian Belanja Barang **Tahun 2025 (Audited) dan tahun 2024** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Laporan Keuangan KPKNL Medan Tahun 2025 (Audited)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun)	%
Belanja Barang Operasional	1.047.556.511	981.336.600	66.219.911,00	6,75
Belanja Barang Non Operasional	402.415.490	386.269.265	16.146.225,00	4,18
Belanja Barang Persediaan	207.631.710	179.428.200	28.203.510,00	15,72
Belanja Jasa	-	9.408.835	-9.408.835,00	-100,00
Belanja Pemeliharaan	312.563.125	447.455.968	-134.892.843,00	-30,15
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	641.145.546	955.649.944	-314.504.398,00	-32,91
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	0,00	0,00
Belanja Barang BLU	-	-	0,00	0,00
Total Belanja Barang Kotor	2.611.312.382	2.959.548.812	-348.236.430,00	-11,77
Total Pengembalian Belanja Barang	-	-	0,00	0,00
Total Belanja Barang Netto	2.611.312.382,00	2.959.548.812,00	-348.236.430,00	-11,77

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 (Audited) dan 31 Desember 2024 (Audited) adalah masing-masing sebesar Rp139.289.300,00 dan Rp2.463.600.701,00.

Rincian Belanja Modal 31 Desember 2025 (Audited) dan 31 Desember 2024 (Audited) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024 (Audited)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.289.300	1.065.692.650	-926.403.350,00	-86,93
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	846.265.598	-846.265.598,00	-100,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi	-	-	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	-	551.642.453	-551.642.453,00	-100,00
Belanja Modal BLU	-	-	0,00	0,00
Total Belanja Modal Kotor	139.289.300	2.463.600.701	-2.324.311.401,00	-94,35
Total Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00	0,00
Total Belanja Modal Netto	139.289.300,00	2.463.600.701,00	-2.324.311.401,00	-94,35

B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 (Audited) dan 31 Desember 2024 (Audited) adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2025 (Audited) dan 31 Desember 2024 (Audited) dapat dilihat pada table berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 (Audited) dan 31 Desember 2024 (Audited) adalah masing-masing sebesar Rp139.289.300,00 dan Rp1.065.692.650,00.

Kenaikan Penurunan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Naik (Turun) %
-	-	-
139.289.300	1.065.692.650	-0,87
-	-	0,00
139.289.300	1.065.692.650	0,00
-	-	0,00
139.289.300	1.065.692.650	-6,00

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp846.265.598,00.

Perbandingan realiasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Nalk (Turun) %
- Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
- Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	-	-	0,00
- Upah tenaga kerja dan honor pengelola tenaga kerja	-	-	0,00
- Perjalanan gedung dan bangunan	-	-	0,00
- Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	846.265.598	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	846.265.598	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	-	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	846.265.598	-68,60

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 .

Perbandingan realiasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Nalk (Turun) %
- Irigasi	0	0	0,00
- Jaringan	0	0	0,00
- Penambahan nilai jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

B.10 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 551.642.453,00.

Perbandingan realiasi belanja modal lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Nalk (Turun) %
Modal lainnya	551.642.453	0	0,00
Penambahan nilai aset tetap lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	551.642.453	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	-	0,00
Jumlah Belanja Bersih	551.642.453	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA**Aset Lancar**

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar KPKNL Medan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.923.658.190,00 dan Rp 11.196.180.481,00.

Rincian Aset Lancar pada KPKNL Medan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	909.090	10.220.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	1.841.338.513	11.047.669.772
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	7.671.740	93.535.242
Persediaan	73.738.847	44.755.467
JUMLAH ASET LANCAR	1.923.658.190	11.196.180.481

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran KPKNL Medan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Saldo Rekening	-	-
Uang Tunai	-	-
Kuitansi belum dipertanggungjawabkan	-	-
	0	0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp909.090,00 dan Rp 10.220.000,00. Kas di Bendahara

Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak .

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Bank No acc ... (terlampir)	909.090	10.220.000
Uang Tunai	-	-
	909.090	10.220.000

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan dana selain Uang Persediaan (UP/TUP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran di lingkungan KPKNL Medan berupa dana pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran serta pajak pajak yang sudah dipungut oleh bendahara penerimaan/pengeluaran namun belum disetorkan ke kas Negara serta kas lainnya di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.841.338.513,00 dan Rp11.047.669.772,00 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1.841.338.513,00	11.047.669.772
	1.841.338.513,00	11.047.669.772

C.4 Pendapatan yang masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 7.671.740 dan Rp93.535.242,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Bea Lelang PL I	7.671.740	93.535.242

Nilai Pendapatan yang Masih Harus Diterima KPKNL Medan terdiri atas kinerja lelang Pejabat Lelang Kelas I yang telah dilaksanakan pada periode Tahun 2025 (Audited) namun sampai

dengan akhir periode laporan pemenang lelang belum melunasi nilai pokok lelangnya sehingga bea lelang PL I nya belum disetor ke rekening kas negara, dihitung berdasarkan nilai penetapan bea lelang oleh Pejabat Lelang Kelas I yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

C.5 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 (Audited) dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp73.738.847,00 dan Rp 44.755.467,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	73.738.847,00	44.755.467,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00
Suku Cadang	0,00	0,00
Pita Cukai Materai dan Leges	0,00	0,00
ATL untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
Bahan Baku	0,00	0,00
Persediaan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	73.738.847,00	44.755.467,00

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp0,00 dalam kondisi rusak;
- Persediaan senilai Rp0,00 dalam kondisi usang.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji sebesar Rp8.676.470.123,00 dan Rp8.942.705.570,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset tetap pada KPKNL Medan berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Tanah	3.798.662.202	3.798.662.202

Laporan Keuangan KPKNL Medan Tahun 2025 (Audited)

2	Peralatan dan Mesin	4.303.554.618	5.203.396.059
3	Gedung dan Bangunan	4.138.425.855	4.138.425.855
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
5	Aset Tetap Lainnya	4.332.000	7.196.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
7	Aset Tetap yang Belum Diregister		
Jumlah Aset Tetap			
Akumulasi Penyusutan		(3.568.504.552)	(4.204.974.546)
Nilai Buku Aset Tetap		8.676.470.123	8.942.705.570

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki KPKNL Medan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.798.662.202,00 dan Rp3.798.662.202,00.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024 (Audited)	3.798.662.202
Mutasi Tambah :	
112 Perolehan Lainnya	0,
102 Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang :	
302 Transfer keluar	0,
Saldo per 31 Desember 2025	3.798.662.202

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No.	Alamat lokasi Tanah	Luas (m2)	Nilai
1	Jalan Bromo Gg. Setuju No. 5 Medan	253	93.112.602,00
2	Perumahan Malibu Blok B 77	191	2.205.549.600,00
3	Jalan Sembada X Medan Selayang	600	1.500.000.000,00
		1.044	3.798.662.202,00

Pada tanggal pelaporan semua tanah tersebut dikuasai dan digunakan oleh KPKNL Medan.

C.7 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin KPKNL Medan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah dan Rp 4.303.554.618,00 dan Rp5.203.396.059,00.

Rincian mutasi nilai aset peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 1 Januari 2025	5.203.396.059
Mutasi Tambah :	
100 Koreksi Saldo awal	-
101 Pembelian	139.289.300
102 Transfer Masuk	47.175.700
103 Hibah masuk	-
105 Penyelesaian Pembangunan dengan kdp	-
106 Pembatalan Penghapusan	-
107 Reklasifikasi Masuk	-
112 Perolehan Lainnya	-
115 Input perolehan BMN oleh Tim Pengemb	-
177 Reklas dari aset lainnya ke aset tetap	-
Perolehan Reklas dari intra ke ekstra/sebalikr	-
202 Pengembangan Nilai Aset	-
204 Koreksi Pencatatan	-
208 Pengembangan melalui KDP	-
402 Penggunaan kembali BMN yang sudah di	-
Mutasi Kurang :	
204 Koreksi Pencatatan Nilai/uantitas	-
301 Penghapusan	-
302 Transfer keluar	-
304 Reklasifikasi keluar	-
305 Koreksi Pencatatan	-
401 Penghentian aset dari penggunaan	(1.086.306.441)
911 Pencatatan barang yang mau dihapuskar	-
Belum teridentifikasi	-
Saldo per 31 Desember 2025	4.303.554.618

Realisasi belanja modal Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2025 (Audited) sebesar Rp139.289.300,00 .

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin sebagai berikut :

- a. Transaksi penambahan dari Pembelian

1	Sepeda Motor Listrik	48.000.000,
2	Rak Besi	29.850.000,
3	CCTV	14.996.100,
5	Mesin Cuci	14.563.200,
6	A.C Split	31.880.000,
	Jumlah	139.289.300

b. Transaksi penambahan dari Transfer masuk

1	Laptop	47.175.700,
	Jumlah	47.175.700

C.8 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4.138.425.855,00 dan Rp4.138.425.855,00 Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp3.831.820.685,00.

Rincian mutasi gedung dan bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	4.138.425.855
Mutasi Tambah :	
101 Pembelian	-
208 Pengembangan melalui KDP	-
Mutasi Kurang :	
264 Koreksi pencatatan Nilai berkurang	-
304 Reklasifikasi keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025 (Audited)	4.138.425.855

C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.332.000,00 dan Rp7.196.000,00.

Rincian mutasi aset tetap lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2024 (Audited)	7.196.000
Mutasi Tambah :	
105 Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Mutasi Kurang :	
401 Penghentian aset dari penggunaan	(2.864.000)
Saldo per 31 Desember 2025 (Audited)	4.332.000

Tahun 2025 terdapat penghentian asset dari penggunaan sebesar Rp (2.864.000,00).

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar RP (3.568.504.552,00) dan Rp (4.204.974.546,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	3.798.662.202		3.798.662.202
2	Peralatan & Mesin	5.232.243.385	3.261.899.382	1.970.344.003
3	Gedung & bangunan	4.138.425.855	306.605.170	3.831.820.685
4	Jalan, Irigasi & Jaringan			0
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan			0
6	Aset Tetap Lainnya	4.332.000		4.332.000
7	Aset Tetap yang belum Diregister			0
	Jumlah	13.173.663.442	3.568.504.552	9.605.158.890

C.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan membayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek KPKNL Medan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 1.841.338.513,00 dan Rp 11.048.402.954,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Utang kepada Pihak Ketiga	1.841.338.513,00	11.042.015.454
2	Utang yang Belum Ditagihkan	0,00	0,00
3	Hibah yang belum disahkan	0,00	0,00
4	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	0,00	0,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
6	Uang Muka dari KPPN	0,00	0,00
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	6.387.500,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.841.338.513,00	11.048.402.954,00

C.12. Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.841.338.513,00 dan Rp 11.042.015.454,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada KPKNL Medan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai
1	Belanja Pegawai yang belum dibayar	-
2	Belanja Barang yang belum dibayar	-
3	Belanja Modal yang belum dibayar	-
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	-
5	Pegeluaran Transito yang masih harus dibayar	-
6	Utang kepada Pihak ketiga lainnya	1.841.338.513
7	Dana Pihak ketiga	
8	Dana Pihak ketiga Lainnya - BLU	-
	Jumlah	1.841.338.513,00

C.13. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.14. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 6.387.500,00 .

C.15. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp8.761.653.800,00 dan Rp 9.090.483.097,00.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus (Defisit) Laporan Operasional

Merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Surplus/defisit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp35.508.760.425,00 dan Rp 24.161.904.819,00.

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar 38.539.802.874,00 dan Rp 27.610.076.740,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun %)
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	172.135.370	79.469.651	217
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	5.183.440.748	5.526.512.040	94
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	33.179.595.353	22.002.831.049	151
Pendapatan Jasa Lainnya	500.000		#DIV/0!
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan		1.264.000	-
Pendapatan pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Pendapatan Anggaran Lain-Lain	3.979.403	-	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi	152.000	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	
	38.539.802.874	27.610.076.740	40

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Mulai 1 Agustus 2020 pembayaran gaji pegawai KPKNL Medan sudah dipindahkan terpusat di Kantor Pusat DJKN dan terhitung mulai 1 Juli 2022 pembayaran gaji dipusatkan pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga pada satker KPKNL Medan tidak ada pagu maupun realisasi pembayaran untuk periode laporan ini sehingga pada laporan keuangan ini tidak terdapat beban belanja pegawai.

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp178.648.330 dan Rp 197.093.160,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi/pemakaian atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	178.648.330	197.093.160	- 9,36
Jumlah	178.648.330	197.093.160	- 9,36

D.4 Beban Barang & Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.449.972.001,00 dan Rp 1.377.444.769,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Beban Barang dan Jasa	1.449.972.001	1.377.444.769	5,27
Jumlah	1.449.972.001	1.377.444.769	5,27

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2025 (Audited) dan 31 Desember 2025 (Audited) adalah masing-masing sebesar Rp312.563.125,00 dan Rp 447.455.968,00.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 (Audited) dan 31 Desember 2025 (Audited) adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	745.000	41.745.270	(98,22)
Beban Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	48.184.200	113.189.600	(57,43)
Beban pemeliharaan jaringan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	263.633.925	292.521.098	(9,88)
Beban pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Beban pemeliharaan	-	-	-
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
Jumlah	312.563.125	447.455.968	(30,15)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2025 (Audited) dan 31 Desember 2024 (Audited) adalah masing-masing sebesar Rp 641.145.546,00 dan Rp 955.649.944,00.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited) adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	525.129.546	843.717.944	(37,76)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	116.016.000	111.932.000	3,65
Beban Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	-	-
Beban Perjalanan	-	-	-
Jumlah	641.145.546	955.649.944	(32,91)

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited) adalah masing-masing sebesar Rp449.836.447,00 dan Rp 472.106.080,00.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 (Audited) dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	354.094.237	379.729.149	(6,75)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	95.542.210	92.376.931	3,43
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasioan Pemerintah	200.000	-	-
Jumlah Penyusutan	449.836.447	472.106.080	(4,72)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Lain-lain	-	-	-
Beban penyusutan aset kelolaan BUN	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	449.836.447	472.106.080	(4,72)

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 (Audited) dan Tahun 2024 (Audited) adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan peralatan dan mesin	-	-	-
Tukar menukar peralatan dan mesin	-	-	-
Pemindahtanganan BMN lainnya	-	-	-
Beban pelepasan aset non lancar	-	-	-
Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	1.123.000	1.578.000	-
Pendapatan selisih kurs terealisasi - BLU	-	-	-
Penerimaan kembali belanja barang BLU TAYL	-	-	-
Pendapatan penyelesaian TGR	-	-	-
Pendapatan penyelesaian TP	-	-	-
Penerimaan kembali B.Peg TAYL	-	-	-
Penerimaan kembali B.Brg TAYL	-	-	-
Penerimaan kembali B.Mdl TAYL	-	-	-
Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi BLU	-	-	-
Pendapatan Perolehan aset lainnya	-	-	-
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	-	-	-
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	-	-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.123.000	1.578.000	-

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 (Audited) dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 8.761.653.800,00 dan Rp 9.090.483.097,00.terdiri dari :

Uraian	Tahun 2025 (Audited)	Tahun 2024 (Audited)	Naik (Turun) %
Ekuitas awal	9.090.483.097	7.567.454.216	20,13
Surplus (Defisit) LO	35.508.760.425	24.161.904.819	46,96
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	-	-	-
Transaksi antar entitas	(35.837.589.722)	(22.638.875.938)	58,30
Kenalkan/Penurunan ekuitas	(328.829.297)	1.523.028.881	(121,59)
Ekuitas akhir	8.761.653.800	9.090.483.097	(3,62)

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 dan 01 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.090.483.097 dan Rp7.567.454.216,00.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar surplus Rp35.508.760.425,00 dan Rp 24.161.904.819,00.

Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp(35.837.589.722,00) dan Rp (22.638.875.938,00)

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

OBJ

- Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar –Rp38.636.100.286,00 sedangkan DKEL sebesar Rp2.750.601.682,00.
- Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp47.175.700,00 dan Transfer Keluar sebesar Rp733.182,00.

E.4 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp (328.829.297,00) dan Rp1.523.028.881,00.

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 (Audited) dan 31 Desember 2024 (Audited) adalah masing-masing sebesar Rp8.761.653.800,00 dan Rp9.090.483.097,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 . PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

➤ Capaian Kinerja/Output

Capaian kinerja/output 31 Desember 2025 dapat dilihat pada table berikut :

Laporan Keuangan KPKNL Medan Tahun 2025 (Audited)

Uraian Output	Belanja			Output		
	Pagu	Ralisasi	%	Target	Realisasi	%
Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	242.745.000	202.189.151	83,29	450	450	100,00
Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang	160.418.000	152.667.877	95,17	150	150	100,00
Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	87.552.000	50.153.040	57,28	900	900	100,00
Sosialisai Pengelolaan Kekayaan Negara	7.400.000	136.500	1,84	1	1	100,00
Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	4.200.000	-	0,00	1	1	100,00
Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	2.327.999	9	0,00	1	1	100,00
Risalah Lelang	56.591.000	56.003.000	98,96	1300	1300	100,00
Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	18.252.000	17.277.000	94,66	1	1	100,00
Rekomendasi Hasil Penilaian	16.800.000	11.610.000	69,11	2	2	100,00
Penggalian Potensi Lelang	33.257.000	14.841.000	44,63	2	2	100,00
Aset BUN yang Dikelola	182.677.000	153.872.625	84,23	36	36	100,00
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang	17.514.000	11.700.900	66,81	516	516	100,00
Pembinaan/Edukasi Publik	59.200.000	19.864.000	33,55	100	100	100,00
Kehumasan	3.060.000	1.800.000	58,82	1	1	100,00
Pameran/Eksibisi	1.000.000	-	0,00	1	1	100,00
Kerumahtanggaan	203.870.000	165.614.386	81,24	12	12	100,00
Layanan Bantuan Hukum	126.210.000	104.106.371	82,49	80	80	100,00
Layanan Perkantoratn	1.746.552.000	1.567.751.346	89,76	12	12	100,00
Peralatan FasilitasPerkantoran	274.023.000	144.419.870	52,70	125	125	100,00
Rekomendasi Kepatuhan Internal	68.448.000	28.594.616	41,78	5	5	100,00
Kendaraan Bermotor	48.000.000	48.000.000	100,00	2	2	100,00

➤ Nilai IKPA, SMART DJA

Nilai capaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) cukup baik yaitu 99,99%

Nilai capaian IKPA dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator IKU	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
A) Nilai IKPA (Bobot 50%)			99,99
1. Revisi DIPA	100,00	10	10,00
2. Deviasi Hal III DIPA	100,00	10	10,00
3. Penyerapan Anggaran	100,00	20	20,00
4. Belanja Kontraktual	100,00	10	10,00
5. Penyelesaian Tagihan	100,00	10	10,00
6. Pengelolaan UP dan TUP	99,91	10	9,99
7. Dispensasi SPM	100,00	5	5,00
8. Capaian Output	100,00	25	25,00
B) Nilai SMART (Bobot 50%)			96,28
1. CRO	100,00	75	75,00
2. Penggunaan SBK	75,00	10	7,50
3. Efisiensi SBK	91,85	15	13,78
Nilai Kinerja Anggaran s.d. Triwulan - IV			98,13
Target IKU IKA			91,00
Indeks Capaian Kinerja IKU IKA Triwulan - IV			120,00

LAMPIRAN

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (537831) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MEDAN

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:22 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	38,539,802,874	27,610,076,740	10,929,726,134	39.586
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	38,539,802,874	27,610,076,740	10,929,726,134	39.586
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	38,539,802,874	27,610,076,740	10,929,726,134	39.586
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	178,648,330	197,093,160	(18,444,830)	(9.358)
Beban Barang dan Jasa	1,449,972,001	1,377,444,769	72,527,232	5.265
Beban Pemeliharaan	312,563,125	447,455,968	(134,892,843)	(30.147)
Beban Perjalanan Dinas	641,145,546	955,649,944	(314,504,398)	(32.91)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (537831) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MEDAN

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:22 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	449,836,447	472,106,080	(22,269,633)	(4.717)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,032,165,449	3,449,749,921	(417,584,472)	(12.105)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	35,507,637,425	24,160,326,819	11,347,310,606	46.967
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	1,123,000	0	1,123,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	1,123,000	0	1,123,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	1,578,000	(1,578,000)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	19,128,000	(19,128,000)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	17,550,000	(17,550,000)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1,123,000	1,578,000	(455,000)	(28.834)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	35,508,760,425	24,161,904,819	11,346,855,606	46.962
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	35,508,760,425	24,161,904,819	11,346,855,606	46.962

Keterangan :
FINAL

Medan, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Heri Supriyanto
198112152002121002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (537831) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MEDAN

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:24 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	9,090,483,097	7,567,454,216	1,523,028,881	20.13
SURPLUS/DEFISIT-LO	35,508,760,425	24,161,904,819	11,346,855,606	46.96
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(35,837,589,722)	(22,638,875,938)	(13,198,713,784)	58.3
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(328,829,297)	1,523,028,881	(1,851,858,178)	(121.59)
EKUITAS AKHIR	8,761,653,800	9,090,483,097	(328,829,297)	(3.62)

Keterangan :

FINAL

Medan, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Heri Supriyanto

198112152002121002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN 537831

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:24 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	21,933,199,000	38,636,100,286	16,702,901,286	176	19,563,030,000	27,521,245,498	(7,958,215,498)	141
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	21,933,199,000	38,636,100,286	16,702,901,286	176	19,563,030,000	27,521,245,498	(7,958,215,498)	141
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	21,933,199,000	38,636,100,286	16,702,901,286	176	19,563,030,000	27,521,245,498	(7,958,215,498)	141
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	3,360,096,000	2,750,601,682	(609,494,318)	82	5,927,193,000	5,423,149,513	504,043,487	91
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	3,095,073,000	2,611,312,382	(483,760,618)	84	3,388,022,000	2,959,548,812	428,473,188	87
3. Belanja Modal	265,023,000	139,289,300	(125,733,700)	53	2,539,171,000	2,463,600,701	75,570,299	97
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN 537831

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:24 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	3,360,096,000	2,750,601,682	(609,494,318)	82	5,927,193,000	5,423,149,513	504,043,487	91
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Medan, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Heri Supriyanto
198112152002121002

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (537831) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MEDAN

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:26 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	909,090	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1,841,338,513	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	7,671,740	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	73,738,847	0
0.0	131111	Tanah	3,798,662,202	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,303,554,618	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,138,425,855	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	4,332,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,261,899,382
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	306,605,170
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	853,720,441	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	850,856,441
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	1,841,338,513
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,750,601,682
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	38,636,100,286	0
0.0	313211	Transfer Keluar	0	733,182
0.0	313221	Transfer Masuk	0	47,175,700
0.0	391111	Ekuitas	0	9,090,483,097
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,123,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	152,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	33,179,595,353
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	5,183,440,748
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	172,135,370
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	3,979,403
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	855,528,661	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	3,942,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,839,850	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	119,280,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	49,966,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	185,814,920	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	163,470,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	53,130,570	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	745,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	48,184,200	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	263,633,925	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	525,129,546	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	116,016,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (537831) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MEDAN

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM
Tgl Cetak : 05/05/26 3:26 PM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	354,094,237	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	95,542,210	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	200,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	178,648,330	0
JUMLAH			56,690,619,041	56,690,619,041

Keterangan :
FINAL

Medan, 5 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Heri Supriyanto
198112152002121002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (537831) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MEDAN

Tgl Data : 05/05/26 12:37 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:26 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,750,601,682
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	38,636,100,286	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,123,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	152,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	33,272,698,393
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	5,186,421,210
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	171,226,280
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	3,979,403
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	855,528,661	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3,942,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,839,850	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	119,280,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	49,966,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	185,814,920	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	163,470,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	53,130,570	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	207,631,710	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	745,000	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	48,184,200	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	263,633,925	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	525,129,546	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	116,016,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139,289,300	0
JUMLAH			41,386,701,968	41,386,701,968

Keterangan :

FINAL

Medan, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Heri Supriyanto
198112152002121002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (537831) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MEDAN

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:25 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	909,090	10,220,000	(9,310,910)	(91.10)
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,841,338,513	11,047,669,772	(9,206,331,259)	(83.33)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	7,671,740	93,535,242	(85,863,502)	(91.80)
Persediaan	73,738,847	44,755,467	28,983,380	64.76
JUMLAH ASET LANCAR	1,923,658,190	11,196,180,481	(9,272,522,291)	(82.82)
ASET TETAP				
Tanah	3,798,662,202	3,798,662,202	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,303,554,618	5,203,396,059	(899,841,441)	(17.29)
Gedung dan Bangunan	4,138,425,855	4,138,425,855	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	4,332,000	7,196,000	(2,864,000)	(39.80)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,568,504,552)	(4,204,974,546)	636,469,994	(15.14)
JUMLAH ASET TETAP	8,676,470,123	8,942,705,570	(266,235,447)	(2.98)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	853,720,441	0	853,720,441	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(850,856,441)	0	(850,856,441)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	2,864,000	0	2,864,000	
JUMLAH ASET	10,602,992,313	20,138,886,051	(9,535,893,738)	(47.35)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,841,338,513	11,042,015,454	(9,200,676,941)	(83.32)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	6,387,500	(6,387,500)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,841,338,513	11,048,402,954	(9,207,064,441)	(83.33)
JUMLAH KEWAJIBAN	1,841,338,513	11,048,402,954	(9,207,064,441)	(83.33)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	8,761,653,800	9,090,483,097	(328,829,297)	(3.62)
JUMLAH EKUITAS	8,761,653,800	9,090,483,097	(328,829,297)	(3.62)
JUMLAH EKUITAS	8,761,653,800	9,090,483,097	(328,829,297)	(3.62)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	10,602,992,313	20,138,886,051	(9,535,893,738)	(47.35)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

**SATUAN KERJA : (537831) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG MEDAN**

Tgl Data : 05/05/26 1:32 PM

Tgl Cetak : 05/05/26 3:25 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Medan, 5 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Heri Supriyanto

198112152002121002 198112152002121002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 002
SATUAN KERJA : 537831
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 10:19 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/26 8:11 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	862,442,000	879,852,000	855,528,661	0	855,528,661	97.24	24,323,339
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	11,628,000	11,628,000	3,942,000	0	3,942,000	33.9	7,686,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	50,000,000	25,000,000	18,839,850	0	18,839,850	75.36	6,160,150
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	143,160,000	130,160,000	119,280,000	0	119,280,000	91.64	10,880,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	50,000,000	49,966,000	0	49,966,000	99.93	34,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,067,230,000	1,096,640,000	1,047,556,511	0	1,047,556,511	95.52	49,083,489
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	215,352,000	271,525,000	185,814,920	0	185,814,920	68.43	85,710,080
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	217,400,000	182,190,000	163,470,000	0	163,470,000	89.73	18,720,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	57,000,000	53,130,570	0	53,130,570	93.21	3,869,430
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	432,752,000	510,715,000	402,415,490	0	402,415,490	78.79	108,299,510
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	203,000,000	262,680,000	207,631,710	0	207,631,710	79.04	55,048,290
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	203,000,000	262,680,000	207,631,710	0	207,631,710	79.04	55,048,290
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16,296,000	2,026,000	745,000	0	745,000	36.77	1,281,000
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	81,396,000	49,966,000	48,184,200	0	48,184,200	96.43	1,781,800
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	313,860,000	337,180,000	263,633,925	0	263,633,925	78.19	73,546,075
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	411,552,000	389,172,000	312,563,125	0	312,563,125	80.31	76,608,875
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	717,749,000	660,114,000	525,129,546	0	525,129,546	79.55	134,984,454
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	176,256,000	175,752,000	116,016,000	0	116,016,000	66.01	59,736,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	894,005,000	835,866,000	641,145,546	0	641,145,546	76.7	194,720,454
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,008,539,000	3,095,073,000	2,611,312,382	0	2,611,312,382	84.37	483,760,618
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273,332,000	265,023,000	139,289,300	0	139,289,300	52.56	125,733,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	273,332,000	265,023,000	139,289,300	0	139,289,300	52.56	125,733,700
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	273,332,000	265,023,000	139,289,300	0	139,289,300	52.56	125,733,700
	JUMLAH BELANJA	3,281,871,000	3,360,096,000	2,750,601,682	0	2,750,601,682	81.86	609,494,318

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 002
SATUAN KERJA : 537831
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/26 3:27 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 5/5/26 2:07 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	862,442,000	879,852,000	855,528,661	0	855,528,661	97.24	24,323,339
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	11,628,000	11,628,000	3,942,000	0	3,942,000	33.9	7,686,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	50,000,000	25,000,000	18,839,850	0	18,839,850	75.36	6,160,150
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	143,160,000	130,160,000	119,280,000	0	119,280,000	91.64	10,880,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	50,000,000	49,966,000	0	49,966,000	99.93	34,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,067,230,000	1,096,640,000	1,047,556,511	0	1,047,556,511	95.52	49,083,489
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	215,352,000	271,525,000	185,814,920	0	185,814,920	68.43	85,710,080
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	217,400,000	182,190,000	163,470,000	0	163,470,000	89.73	18,720,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	57,000,000	53,130,570	0	53,130,570	93.21	3,869,430
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	432,752,000	510,715,000	402,415,490	0	402,415,490	78.79	108,299,510
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	203,000,000	262,680,000	207,631,710	0	207,631,710	79.04	55,048,290
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	203,000,000	262,680,000	207,631,710	0	207,631,710	79.04	55,048,290
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16,296,000	2,026,000	745,000	0	745,000	36.77	1,281,000
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	81,396,000	49,966,000	48,184,200	0	48,184,200	96.43	1,781,800
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	313,860,000	337,180,000	263,633,925	0	263,633,925	78.19	73,546,075
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	411,552,000	389,172,000	312,563,125	0	312,563,125	80.31	76,608,875
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	717,749,000	660,114,000	525,129,546	0	525,129,546	79.55	134,984,454
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	176,256,000	175,752,000	116,016,000	0	116,016,000	66.01	59,736,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	894,005,000	835,866,000	641,145,546	0	641,145,546	76.7	194,720,454
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,008,539,000	3,095,073,000	2,611,312,382	0	2,611,312,382	84.37	483,760,618
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	273,332,000	265,023,000	139,289,300	0	139,289,300	52.56	125,733,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	273,332,000	265,023,000	139,289,300	0	139,289,300	52.56	125,733,700
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	273,332,000	265,023,000	139,289,300	0	139,289,300	52.56	125,733,700
	JUMLAH BELANJA	3,281,871,000	3,360,096,000	2,750,601,682	0	2,750,601,682	81.86	609,494,318

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

Tanggal : 05/05/26 3:27 PM

SATUAN KERJA : 537831

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_fsfp_g_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	PELAYANAN UMUM							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	13,927,000	13,927,000	136,500	0	136,500	0.98	13,790,500
4798	Pengelolaan Aset	1,002,682,000	815,806,000	670,314,593	0	670,314,593	82.17	145,491,407
	JUMLAH PROGRAM Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	1,016,609,000	829,733,000	670,451,093	0	670,451,093	80.8	159,281,907
WA	Program Dukungan Manajemen							
4700	Legislasi dan Litigasi	126,210,000	126,210,000	104,106,371	0	104,106,371	82.49	22,103,629
4700	Legislasi dan Litigasi	126,210,000	126,210,000	104,106,371	0	104,106,371	82.49	22,103,629
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,007,344,000	2,272,445,000	1,925,785,602	0	1,925,785,602	84.75	346,659,398
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2,007,344,000	2,272,445,000	1,925,785,602	0	1,925,785,602	84.75	346,659,398
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	63,260,000	63,260,000	21,664,000	0	21,664,000	34.25	41,596,000
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	63,260,000	63,260,000	21,664,000	0	21,664,000	34.25	41,596,000
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	68,448,000	68,448,000	28,594,616	0	28,594,616	41.78	39,853,384
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	68,448,000	68,448,000	28,594,616	0	28,594,616	41.78	39,853,384
	JUMLAH PROGRAM Program Dukungan Manajemen	4,530,524,000	5,060,726,000	4,160,301,178	0	4,160,301,178	82.21	900,424,822
	JUMLAH SUBFUNGSI LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	5,547,133,000	5,890,459,000	4,830,752,271	0	4,830,752,271	82.01	1,059,706,729
	JUMLAH FUNGSI PELAYANAN UMUM	5,547,133,000	5,890,459,000	4,830,752,271	0	4,830,752,271	82.01	1,059,706,729

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
SATUAN KERJA : 537831

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 06/05/26 10:14 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	11,600,000	11,600,000	136,500	0	136,500	1.18	11,463,500
4798	Pengelolaan Aset	912,283,000	725,958,000	599,470,593	0	599,470,593	82.58	126,487,407
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CD	923,883,000	737,558,000	599,607,093	0	599,607,093	81.3	137,950,907
WA	Program Dukungan Manajemen							
4700	Legislasi dan Litigasi	126,210,000	126,210,000	104,106,371	0	104,106,371	82.49	22,103,629
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1,881,612,000	2,146,713,000	1,925,785,602	0	1,925,785,602	89.71	220,927,398
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	63,260,000	63,260,000	21,664,000	0	21,664,000	34.25	41,596,000
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	68,448,000	68,448,000	28,594,616	0	28,594,616	41.78	39,853,384
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	2,139,530,000	2,404,631,000	2,080,150,589	0	2,080,150,589	86.51	324,480,411
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	3,063,413,000	3,142,189,000	2,679,757,682	0	2,679,757,682	85.28	462,431,318
04	PNBP							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	2,327,000	2,327,000	0	0	0	0	2,327,000
4798	Pengelolaan Aset	90,399,000	89,848,000	70,844,000	0	70,844,000	78.85	19,004,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM CD	92,726,000	92,175,000	70,844,000	0	70,844,000	76.86	21,331,000
WA	Program Dukungan Manajemen							
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	125,732,000	125,732,000	0	0	0	0	125,732,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	125,732,000	125,732,000	0	0	0	0	125,732,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
SATUAN KERJA : 537831

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 06/05/26 10:14 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA PNBP	218,458,000	217,907,000	70,844,000	0	70,844,000	32.51	147,063,000
	JUMLAH	3,281,871,000	3,360,096,000	2,750,601,682	0	2,750,601,682	81.86	609,494,318

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
SATUAN KERJA : 537831

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/26 10:08 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	862,442,000	879,852,000	855,528,661	0	855,528,661	97.24	24,323,339
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	11,628,000	11,628,000	3,942,000	0	3,942,000	33.9	7,686,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	50,000,000	25,000,000	18,839,850	0	18,839,850	75.36	6,160,150
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	143,160,000	130,160,000	119,280,000	0	119,280,000	91.64	10,880,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	50,000,000	49,966,000	0	49,966,000	99.93	34,000
521211	Belanja Bahan	158,692,000	214,892,000	132,166,420	0	132,166,420	61.5	82,725,580
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	217,400,000	182,190,000	163,470,000	0	163,470,000	89.73	18,720,000
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	57,000,000	53,130,570	0	53,130,570	93.21	3,869,430
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	203,000,000	262,680,000	207,631,710	0	207,631,710	79.04	55,048,290
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16,296,000	2,026,000	745,000	0	745,000	36.77	1,281,000
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	81,396,000	49,966,000	48,184,200	0	48,184,200	96.43	1,781,800
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	313,860,000	337,180,000	263,633,925	0	263,633,925	78.19	73,546,075
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	689,909,000	632,274,000	509,819,046	0	509,819,046	80.63	122,454,954
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	168,030,000	168,050,000	114,131,000	0	114,131,000	67.91	53,919,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	2,915,813,000	3,002,898,000	2,540,468,382	0	2,540,468,382	84.6	462,429,618
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147,600,000	139,291,000	139,289,300	0	139,289,300	100	1,700
	JUMLAH BELANJA MODAL	147,600,000	139,291,000	139,289,300	0	139,289,300	100	1,700
	JUMLAH RUPIAH MURNI	3,063,413,000	3,142,189,000	2,679,757,682	0	2,679,757,682	85.28	462,431,318
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	56,660,000	56,633,000	53,648,500	0	53,648,500	94.73	2,984,500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,840,000	27,840,000	15,310,500	0	15,310,500	54.99	12,529,500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,226,000	7,702,000	1,885,000	0	1,885,000	24.47	5,817,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	92,726,000	92,175,000	70,844,000	0	70,844,000	76.86	21,331,000
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125,732,000	125,732,000	0	0	0	0	125,732,000
	JUMLAH BELANJA MODAL	125,732,000	125,732,000	0	0	0	0	125,732,000
	JUMLAH PNBP	218,458,000	217,907,000	70,844,000	0	70,844,000	32.51	147,063,000
	TOTAL	3,281,871,000	3,360,096,000	2,750,601,682	0	2,750,601,682	81.86	609,494,318

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 01509002KD
SATUAN KERJA : 537831
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/26 10:19 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
4700	Legislasi dan Litigasi							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	10,000,000	15,000,000	12,515,000	0	12,515,000	83.43	2,485,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20,000,000	15,000,000	1,481,500	0	1,481,500	9.88	13,518,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	30,000,000	30,000,000	13,996,500	0	13,996,500	46.66	16,003,500
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60,210,000	57,210,000	55,427,871	0	55,427,871	96.88	1,782,129
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,000,000	39,000,000	34,682,000	0	34,682,000	88.93	4,318,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	96,210,000	96,210,000	90,109,871	0	90,109,871	93.66	6,100,129
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	126,210,000	126,210,000	104,106,371	0	104,106,371	82.49	22,103,629
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4700.EBA	126,210,000	126,210,000	104,106,371	0	104,106,371	82.487	22,103,629
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4700	126,210,000	126,210,000	104,106,371	0	104,106,371	82.49	22,103,629
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	862,442,000	879,852,000	855,528,661	0	855,528,661	97.24	24,323,339
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	11,628,000	11,628,000	3,942,000	0	3,942,000	33.9	7,686,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	50,000,000	25,000,000	18,839,850	0	18,839,850	75.36	6,160,150
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	143,160,000	130,160,000	119,280,000	0	119,280,000	91.64	10,880,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	0	50,000,000	49,966,000	0	49,966,000	99.93	34,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,067,230,000	1,096,640,000	1,047,556,511	0	1,047,556,511	95.52	49,083,489
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	40,479,000	50,479,000	40,468,300	0	40,468,300	80.17	10,010,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	40,479,000	50,479,000	40,468,300	0	40,468,300	80.17	10,010,700
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	203,000,000	262,680,000	207,631,710	0	207,631,710	79.04	55,048,290
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	203,000,000	262,680,000	207,631,710	0	207,631,710	79.04	55,048,290
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,026,000	1,026,000	745,000	0	745,000	72.61	281,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509002KD **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 537831 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/26 10:19 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,026,000	49,026,000	48,184,200	0	48,184,200	98.28	841,800
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	313,860,000	337,180,000	263,633,925	0	263,633,925	78.19	73,546,075
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	315,912,000	387,232,000	312,563,125	0	312,563,125	80.72	74,668,875
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104,511,000	150,511,000	124,306,086	0	124,306,086	82.59	26,204,914
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,880,000	2,880,000	840,000	0	840,000	29.17	2,040,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	107,391,000	153,391,000	125,146,086	0	125,146,086	81.59	28,244,914
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,734,012,000	1,950,422,000	1,733,365,732	0	1,733,365,732	88.87	217,056,268
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EBA	1,734,012,000	1,950,422,000	1,733,365,732	0	1,733,365,732	88.871	217,056,268
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	57,000,000	53,130,570	0	53,130,570	93.21	3,869,430
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	57,000,000	53,130,570	0	53,130,570	93.21	3,869,430
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	57,000,000	53,130,570	0	53,130,570	93.21	3,869,430
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147,600,000	139,291,000	139,289,300	0	139,289,300	100	1,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	147,600,000	139,291,000	139,289,300	0	139,289,300	100	1,700
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	147,600,000	139,291,000	139,289,300	0	139,289,300	100	1,700
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EBB	147,600,000	196,291,000	192,419,870	0	192,419,870	98.028	3,871,130
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4701	1,881,612,000	2,146,713,000	1,925,785,602	0	1,925,785,602	89.71	220,927,398
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik							
BMB	Komunikasi Publik							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	62,260,000	62,260,000	21,664,000	0	21,664,000	34.8	40,596,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	63,260,000	63,260,000	21,664,000	0	21,664,000	34.25	41,596,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	63,260,000	63,260,000	21,664,000	0	21,664,000	34.25	41,596,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4702.BMB	63,260,000	63,260,000	21,664,000	0	21,664,000	34.246	41,596,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4702	63,260,000	63,260,000	21,664,000	0	21,664,000	34.25	41,596,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509002KD **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 537831 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/26 10:19 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
4704 EBD 52 5212 521211	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Layanan Manajemen Kinerja Internal BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan							
		3,000,000	3,000,000	1,289,000	0	1,289,000	42.97	1,711,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,000,000	3,000,000	1,289,000	0	1,289,000	42.97	1,711,000
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							
		62,568,000	62,568,000	26,145,616	0	26,145,616	41.79	36,422,384
		2,880,000	2,880,000	1,160,000	0	1,160,000	40.28	1,720,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	65,448,000	65,448,000	27,305,616	0	27,305,616	41.72	38,142,384
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	68,448,000	68,448,000	28,594,616	0	28,594,616	41.78	39,853,384
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4704.EBD	68,448,000	68,448,000	28,594,616	0	28,594,616	41.776	39,853,384
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4704	68,448,000	68,448,000	28,594,616	0	28,594,616	41.78	39,853,384
4796 AEF 52 5212 521211	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Sosialisasi dan Diseminasi BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan							
		11,600,000	11,600,000	136,500	0	136,500	1.18	11,463,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	11,600,000	11,600,000	136,500	0	136,500	1.18	11,463,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	11,600,000	11,600,000	136,500	0	136,500	1.18	11,463,500
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4796.AEF	11,600,000	11,600,000	136,500	0	136,500	1.177	11,463,500
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4796	11,600,000	11,600,000	136,500	0	136,500	1.18	11,463,500
4798 AAH 52 5212 521211 521219	Pengelolaan Aset Peraturan lainnya BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya							
		20,744,000	44,744,000	43,794,720	0	43,794,720	97.88	949,280
		56,000,000	31,790,000	28,788,500	0	28,788,500	90.56	3,001,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	76,744,000	76,534,000	72,583,220	0	72,583,220	94.84	3,950,780
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							
		278,354,000	249,739,000	239,243,308	0	239,243,308	95.8	10,495,692
		84,690,000	76,890,000	43,030,500	0	43,030,500	55.96	33,859,500

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509002KD **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 537831 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/26 10:19 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	363,044,000	326,629,000	282,273,808	0	282,273,808	86.42	44,355,192
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	439,788,000	403,163,000	354,857,028	0	354,857,028	88.02	48,305,972
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.AAH	439,788,000	403,163,000	354,857,028	0	354,857,028	88.018	48,305,972
ABA 52 5212 521211	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	2,484,000	12,484,000	0	0	0	0	12,484,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,484,000	12,484,000	0	0	0	0	12,484,000
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	76,968,000 8,100,000	59,968,000 15,100,000	36,774,540 13,378,500	0 0	36,774,540 13,378,500	61.32 88.6	23,193,460 1,721,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	85,068,000	75,068,000	50,153,040	0	50,153,040	66.81	24,914,960
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	87,552,000	87,552,000	50,153,040	0	50,153,040	57.28	37,398,960
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.ABA	87,552,000	87,552,000	50,153,040	0	50,153,040	57.284	37,398,960
FAE 52 5241 524111 524113	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,052,000 24,000,000	14,552,000 20,500,000	13,997,000 14,890,000	0 0	13,997,000 14,890,000	96.19 72.63	555,000 5,610,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	35,052,000	35,052,000	28,887,000	0	28,887,000	82.41	6,165,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	35,052,000	35,052,000	28,887,000	0	28,887,000	82.41	6,165,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAE	35,052,000	35,052,000	28,887,000	0	28,887,000	82.412	6,165,000
FAK 52 5212 521211 521219	Pengelolaan Aset BUN BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,925,000 140,400,000	4,925,000 134,400,000	1,928,000 133,200,000	0 0	1,928,000 133,200,000	39.15 99.11	2,997,000 1,200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	145,325,000	139,325,000	135,128,000	0	135,128,000	96.99	4,197,000
5231 523111 523119	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	15,270,000 80,370,000	1,000,000 940,000	0 0	0 0	0 0	0 0	1,000,000 940,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	95,640,000	1,940,000	0	0	0	0	1,940,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509002KD **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 537831 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/26 10:19 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	89,412,000	32,412,000	13,674,625	0	13,674,625	42.19	18,737,375
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,000,000	9,000,000	5,070,000	0	5,070,000	56.33	3,930,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	98,412,000	41,412,000	18,744,625	0	18,744,625	45.26	22,667,375
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	339,377,000	182,677,000	153,872,625	0	153,872,625	84.23	28,804,375
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAK	339,377,000	182,677,000	153,872,625	0	153,872,625	84.232	28,804,375
UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	3,200,000	10,400,000	10,370,900	0	10,370,900	99.72	29,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,200,000	10,400,000	10,370,900	0	10,370,900	99.72	29,100
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,834,000	5,314,000	250,000	0	250,000	4.7	5,064,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480,000	1,800,000	1,080,000	0	1,080,000	60	720,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	7,314,000	7,114,000	1,330,000	0	1,330,000	18.7	5,784,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	10,514,000	17,514,000	11,700,900	0	11,700,900	66.81	5,813,100
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.UAE	10,514,000	17,514,000	11,700,900	0	11,700,900	66.809	5,813,100
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4798	912,283,000	725,958,000	599,470,593	0	599,470,593	82.58	126,487,407
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	3,063,413,000	3,142,189,000	2,679,757,682	0	2,679,757,682	85.28	462,431,318
04	PNBP							
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum							
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125,732,000	125,732,000	0	0	0	0	125,732,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	125,732,000	125,732,000	0	0	0	0	125,732,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	125,732,000	125,732,000	0	0	0	0	125,732,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EBB	125,732,000	125,732,000	0	0	0	0	125,732,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4701	125,732,000	125,732,000	0	0	0	0	125,732,000
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi							
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi							
52	BELANJA BARANG							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 01509002KD **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 537831 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 06/05/26 10:19 AM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,327,000	2,327,000	0	0	0	0	2,327,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,327,000	2,327,000	0	0	0	0	2,327,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,327,000	2,327,000	0	0	0	0	2,327,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4796.AEF	2,327,000	2,327,000	0	0	0	0	2,327,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4796	2,327,000	2,327,000	0	0	0	0	2,327,000
4798	Pengelolaan Aset							
BAH	Pelayanan Publik Lainnya							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	50,053,000	50,053,000	50,018,500	0	50,018,500	99.93	34,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	50,053,000	50,053,000	50,018,500	0	50,018,500	99.93	34,500
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,568,000	5,568,000	5,104,500	0	5,104,500	91.68	463,500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	970,000	970,000	880,000	0	880,000	90.72	90,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	6,538,000	6,538,000	5,984,500	0	5,984,500	91.53	553,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	56,591,000	56,591,000	56,003,000	0	56,003,000	98.96	588,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.BAH	56,591,000	56,591,000	56,003,000	0	56,003,000	98.961	588,000
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	4,280,000	4,253,000	3,630,000	0	3,630,000	85.35	623,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,280,000	4,253,000	3,630,000	0	3,630,000	85.35	623,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,272,000	22,272,000	10,206,000	0	10,206,000	45.82	12,066,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,256,000	6,732,000	1,005,000	0	1,005,000	14.93	5,727,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	29,528,000	29,004,000	11,211,000	0	11,211,000	38.65	17,793,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	33,808,000	33,257,000	14,841,000	0	14,841,000	44.63	18,416,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAE	33,808,000	33,257,000	14,841,000	0	14,841,000	44.625	18,416,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4798	90,399,000	89,848,000	70,844,000	0	70,844,000	78.85	19,004,000
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04	218,458,000	217,907,000	70,844,000	0	70,844,000	32.51	147,063,000
	JUMLAH BELANJA	3,281,871,000	3,360,096,000	2,750,601,682	0	2,750,601,682	81.86	609,494,318

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 537831

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 06/05/26 10:14 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,123,000	0	1,123,000	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	152,000	0	152,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	1,275,000	0	1,275,000	
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000	0	500,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	500,000	0	500,000	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	16,626,251,000	33,272,698,393	0	33,272,698,393	200.12
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	5,251,501,000	5,186,421,210	0	5,186,421,210	98.76
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	55,447,000	171,226,280	0	171,226,280	308.81
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	21,933,199,000	38,630,345,883	0	38,630,345,883	176.13
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	3,979,403	0	3,979,403	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	3,979,403	0	3,979,403	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	21,933,199,000	38,636,100,286	0	38,636,100,286	176.15
	JUMLAH PENDAPATAN	21,933,199,000	38,636,100,286	0	38,636,100,286	176.15

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 537831

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN

Tgl. Cetak 06/05/2026 10:19 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	10,220,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	11,047,669,772	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	93,535,242	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	44,755,467	0
0.0	131111	Tanah	3,798,662,202	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,203,396,059	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,138,425,855	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	7,196,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,993,911,586
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	211,062,960
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	733,182
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	11,041,282,272
0.0	219963	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor	0	6,387,500
0.0	391111	Ekuitas	0	9,090,483,097
JUMLAH			24,343,860,597	24,343,860,597



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425785 Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	171,226,280	0	0	0	0	171,226,280
2	425784 Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	5,186,421,210	0	0	0	0	5,186,421,210
3	425782 Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	33,272,698,393	0	0	0	0	33,272,698,393
4	425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,123,000	0	0	0	0	1,123,000
5	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	152,000	0	0	0	0	152,000
6	425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	3,979,403	0	0	0	0	3,979,403
7	425699 Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000	0	0	0	0	500,000
GRAND TOTAL		0	38,636,100,286	0	0	0	0	38,636,100,286



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN MEDAN II

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 537831 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 26/01/26 10:12

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,360,096,000	3,360,096,000	0
2	Belanja	2,750,601,682	2,750,601,682	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	21,933,199,000	21,933,199,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	38,636,100,286	38,636,100,286	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN****DETAIL INDIKATOR KINERJA DETAIL CAPAIAN RO**

No.	Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Persen Progress	Status Konfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
1	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	CD	4798	AAH	001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	242,745,000	202,189,151	P	450	SuratKeputusan	450	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	450	450	100
2	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	CD	4798	AAH	002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	160,418,000	152,667,877	N	150	SuratKeputusan	150	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	150	150	100
3	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	CD	4798	ABA	002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	87,552,000	50,153,040	N	900	RekomendasiKebijakan	900	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	900	900	100
4	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	CD	4796	AEF	001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	7,400,000	136,500	P	1	orang	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	1	1	100
5	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	CD	4796	AEF	002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	4,200,000	0	P	1	orang	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	1	1	100
6	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	CD	4796	AEF	003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	2,327,000	0	P	1	orang	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	1	1	100
7	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	CD	4798	BAH	001	Risalah Lelang	56,591,000	56,003,000	N	1300	dokumen	1300	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	1300	1300	100

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN**

8	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	CD	4798	FAE	004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	18,252,000	17,277,000	N	1	Rekomendasi	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	1	1	100
9	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	CD	4798	FAE	005	Rekomendasi Hasil Penilaian	16,800,000	11,610,000	P	2	Rekomendasi	2	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	2	2	100
10	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	CD	4798	FAE	007	Penggalian Potensi Lelang	33,257,000	14,841,000	P	2	Rekomendasi	2	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	2	2	100
11	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	CD	4798	FAK	001	Aset BUN yang Dikelola	182,677,000	153,872,625	N	36	Aset	36	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	36	36	100
12	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	CD	4798	UAE	201	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	17,514,000	11,700,900	P	516	Rekomendasi	516	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Time Efficiency	516	516	100
13	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	WA	4702	BMB	001	Pembinaan/Edukasi Publik	59,200,000	19,864,000	P	100	Orang	100	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	100	100	100
14	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	WA	4702	BMB	002	Kehumasan	3,060,000	1,800,000	P	1	kegiatan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	1	1	100
15	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	WA	4702	BMB	003	Pameran/Eksibisi	1,000,000	0	P	1	kegiatan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	1	1	100



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN

16	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	WA	4701	EBA	002	Kerumahtanggaan	203,870,000	165,614,386	P	12	Layanan	12	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	2	Maximize	Stabilized	12	12	100
17	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	WA	4700	EBA	969	Layanan Bantuan Hukum	126,210,000	104,106,371	P	80	Layanan	80	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	80	80	100
18	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	WA	4701	EBA	994	Layanan Perkantoran	1,746,552,000	1,567,751,346	P	12	Layanan	12	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	2	Maximize	Stabilized	12	12	100
19	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	WA	4701	EBB	001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	274,023,000	144,419,870	P	125	Unit	125	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Time Efficiency	125	125	100
20	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	WA	4701	EBB	003	Kendaraan Bermotor	48,000,000	48,000,000	N	2	Unit	2	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	1	1	Maximize	Time Efficiency	2	2	100
21	537831	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN	123	12	WA	4704	EBD	001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	68,448,000	28,594,616	P	5	Dokumen	5	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	5	5	100
Total Nilai																							2,100.00		
Jumlah Output																							21		